



Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Barat

Implementation of Management Information System at the Office of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (SMEs) of West Sumatera Province

Ariyan Pagera^{1*}, Fadilah Zikri², Febrina Dwi Daniati³, Yulia Hanoselina⁴

¹⁻⁴ Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email : ariyanpagera@gmail.com^{1*}, fadilahzikrizikri@gmail.com², febrinadwidaniati@gmail.com³, yuliahanoselina@fis.unp.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 28-04-2025

Revised : 30-04-2025

Accepted : 02-05-2025

Published : 04-05-2025

Abstract

This study aims to analyze the management information system in the cooperative and small and medium enterprise office of west Sumatra province. This study was conducted using qualitative methods and descriptive approaches. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies. The result this study indicate that the implementation of the management information system in the cooperative and small and medium enterprise office of west Sumatra province still relies on information system created by centers such as the ministry of communication and information and theministry of home affairs. This study shows that it is necessary to develop a more independent management information system that is in accordance with the needs of the cooperative and small and medium enterprise office of west Sumatra province to improve the effectiveness of data processing and services.

Keywords : Management Information System, Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi manajemen di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Data diambil melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya sistem informasi manajemen yang terdapat pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Barat masih bergantung dengan sistem informasi manajemen yang dibuat oleh pusat seperti Kominfo dan Kemendagri. Studi ini menunjukkan bahwa perlunya pengembangan sistem informasi manajemen yang lebih mandiri dan sesuai dengan kebutuhan Dinas Koperasi dan usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan efektifitas pengolahan data dan pelayanan.

Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

PENDAHULUAN

Era digital yang berkembang pesat, keberadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sangat penting dalam memproses data yang bervariasi dan rumit. SIM tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung dalam menjalankan operasional harian, tetapi juga berperan sebagai dasar utama dalam membuat keputusan strategis yang tepat (Body, Boonstra, & Kennedy, 2009). SIM bertujuan untuk menyediakan informasi yang tepat dan akurat kepada para pemangku kepentingan pada waktu yang dibutuhkan (Galliers & Leidnar, 2014).



Depan & Seltubir (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwasanya SIM telah menyebar berbagai arus kepentingan pemerintahan yang dimana hal tersebut semakin memudahkan pengelolaan data dan informasi secara aktual. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem yang mampu memberikan data dan informasi kepada pengelola organisasi yang berhubungan dengan pelaksanaan berbagai tugas dalam suatu organisasi (Purnama, 2016).

Perkembangan zaman memicu terjadinya berbagai penyesuaian dalam setiap lini kehidupan. Dampak perkembangan zaman yang paling terasa yaitu adanya digitalisasi dalam setiap aspek kehidupan manusia (Najib & Maunah, 2022). Digitalisasi memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi, produktivitas, mempermudah akses informasi, meningkatkan akurasi dan keamanan data, mempermudah layanan publik (Rodriguez, 2022), mendorong inovasi dan transformasi bisnis hingga menghemat biaya operasional (Sabeeha et al., 2024). Sudah banyak pihak-pihak yang melakukan digitalisasi dalam setiap kegiatannya, begitu pula dengan koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah). Koperasi dan UKM dapat terhubung dengan ekosistem yang lebih luas, termasuk layanan keuangan, pemasaran, dan pendampingan usaha. Tantangan seperti infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia dapat diatasi agar implementasi berjalan optimal.

Usaha kecil menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam Pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam konteks dinas koperasi dan usaha kecil menengah, pendekatan SIM dapat mencakup berbagai aspek, seperti pendataan koperasi dan usaha kecil menengah, pengelolaan perizinan usaha, monitoring program bantuan pemerintah, serta analisis perkembangan usaha kecil dan menengah (Permenkop UKM No.6 Tahun 2020). Dengan sistem informasi yang terintegrasi, dinas dapat memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan berkualitas kepada para pelaku usaha.

Diperlukan suatu sistem yang dapat membantu koperasi dan UKM untuk mengelola data bahkan administrasinya secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi solusi yang dapat mempercepat dan mensistematisasi proses administrasi (Iskanda & Sitorus, 2024), sehingga pengelolaan koperasi dan UKM menjadi lebih optimal. Implementasi SIM memungkinkan pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi dengan mudah, memungkinkan mereka memperoleh data secara *real-time*. Tak hanya itu, SIM juga dapat meningkatkan akurasi dalam pelaporan serta mendukung pengampilan keputusan yang lebih tepat sasaran (Ramadhan et al., 2024). Melalui digitalisasi manajemen, koperasi dan UKM dapat berkembang lebih optimal, mengurangi risiko kesalahan administrasi, serta meningkatkan daya saing dalam ekonomi berbasis teknologi.

Pengimplementasi SIM dalam koperasi dan UKM tentu saja tidak langsung sempurna. Masih banyak tantangan yang dihadapi, baik secara teknis maupun non-teknis yang memengaruhi keberhasilan penerapannya. Secara umum, tantangan utama dalam penerapan SIM di sektor pemerintahan mencakup kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai (Nurlaila Nurlaila et al., 2024), keterbatasan anggaran, resistensi terhadap perubahan, serta keterampilan sumber daya manusia yang belum merata dalam mengoperasikan sistem (Octiva et al., 2024). Selain itu, integrasi data antarinstansi sering kali menjadi hambatan karena perbedaan platform teknologi yang digunakan. Meskipun demikian, pemerintah telah berupaya mengatasi kendala ini melalui



kebijakan transformasi digital, peningkatan kapasitas pegawai, serta pengembangan sistem berbasis cloud untuk memudahkan akses dan integrasi data.

Salah satu pengguna dari SIM yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Barat. Meskipun penerapan SIM di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) telah memberikan berbagai manfaat, proses implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana efektivitas penerapan SIM di Dinas Koperasi dan UKM serta bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan SIM di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, termasuk sejauh mana sistem ini mampu meningkatkan efisiensi transparansi, dan kualitas layanan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi SIM serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Dengan memahami penerapan SIM secara menyeluruh, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem, sehingga koperasi dan UKM dapat lebih berkembang dan berdaya saing dalam era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dapat menyajikan gambaran secara tersruktur, mendalam, dan teliti mengenai fakta serta keterkaitan antara peristiwa yang diteliti. Fokus utama penelitian ini adalah memahami penerapan sistem informasi manajemen di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat, serta mengidentifikasi berbagai sistem informasi manajemen yang digunakan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan salah satu pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan informasi mengenai aplikasi yang digunakan. Observasi langsung dilakukan untuk memahami bagaimana sistem informasi manajemen diterapkan di dinas tersebut. Penelitian kualitatif bertujuan mengungkap makna, konsep, gejala atau deskripsi fenomena secara mendalam (Sidiq dan Choiri, 2019). Pendekatan ini bersifat fleksibel, alami dan holistic, mengutamakan kualitas analisis, serta menyajikan temuan dalam bentuk naratif. Dalam hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat memiliki berbagai aplikasi berbasis digital dalam penerapan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data serta pelayanan kepada masyarakat. Namun pada saat ini, di Dinas Koperasi dan UKM tidak memiliki tim khusus untuk menangani masalah-masalah teknis, sehingga setiap masalah harus dilaporkan ke kantor pusat. Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang ada saat ini tidak dapat mengidentifikasi peluang potensial untuk pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM), sehingga analisis bisnis masih mengandalkan metode tradisional. Untuk mengoptimalkan sistem yang ada saat ini, penting untuk fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan dan membentuk tim khusus untuk mengelola upaya digitalisasi. Berkolaborasi dengan institusi akademis dan penyedia teknologi lokal dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengembangkan alat pendukung yang sederhana namun



efektif. Selain itu, penting juga untuk membuat sistem manajemen pengetahuan yang menjamin keberlangsungan operasional aplikasi, bahkan ketika terjadi pergantian staf.

Pada akhirnya, transformasi digital Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kelola. Dengan demikian, berbagai sistem informasi yang ada dapat menjadi alat yang efektif untuk memajukan koperasi dan UKM, bukan hanya sekadar memenuhi persyaratan administratif. Sangat penting untuk menetapkan tujuan yang jelas dengan pencapaian yang terukur, untuk memastikan bahwa pengembangan sistem informasi selaras dengan kebutuhan para pelaku usaha di lapangan. Dinas koperasi dan usaha kecil menengah menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo), Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Aplikasi-aplikasi tersebut meliputi SIPD, SIPAGA, INAPROC dan SRIKANDI.

Aplikasi utama yang digunakan adalah SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang dibuat oleh Kemendagri, berfungsi untuk pengelolaan laporan keuangan, penatausahaan barang, dan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh. Sedangkan untuk pengelolaan barang milik daerah, dinas koperasi dan UKM provinsi Sumatera Barat menggunakan aplikasi SIPAGA (Sistem Perencanaan dan Harga) yang dibuat oleh BAPENDA dan dirancang untuk memastikan bahwa proses pengadaan hingga pencatatan aset daerah dapat dilakukan secara digital, terdokumentasi dengan baik dan dapat dilakukan pemeriksaan kapan saja. Penggunaan aplikasi ini sangat penting untuk menghindari duplikat aset, kehilangan data, atau penyimpangan dalam proses pengadaan. Selain itu, proses tender dan lelang barang pemerintah sudah mulai mengalami perubahan yang mana awalnya melalui sistem manual sekarang sudah bisa ke sistem digital dengan menggunakan aplikasi INAPROC. Dengan adanya aplikasi ini tender bisa dilakukan secara online dan prosesnya menjadi lebih terbuka, cepat, dan efisien sekaligus dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Keuntungan dari aplikasi ini semua penyedia barang termasuk juga dengan pelaku UMKM punya kesempatan untuk ikut serta, karena aksesnya lebih merata. Sedangkan dalam hal surat menyurat dinas koperasi dan UKM menggunakan aplikasi SRIKANDI yaitu aplikasi persuratan yang dilakukan secara online. Dengan adanya aplikasi SRIKANDI proses surat menyurat baik itu dari pengiriman, pencatatan, hingga pengarsipan dapat dilakukan secara digital dan juga tersusun. Hal ini termasuk langkah penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik dan meningkatkan efisiensi komunikasi antar instansi.

Pada bidang kepegawaian, aplikasi SIMPEG digunakan untuk mengelola status karyawan termasuk proses usulan kenaikan pangkat, mutasi, serta riwayat jabatan. Seluruh data tersebut terintegrasi langsung ke pusat data yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sehingga wewenang pengelolaan secara teknis berada diluar kendali langsung dinas. Selain itu, untuk memantau produktivitas dan kinerja aparatur sipil negara menggunakan aplikasi E-Kinerja digunakan untuk memantau kinerja karyawan setiap hari. Karyawan dapat dengan mudah menandai kehadiran mereka melalui aplikasi AbOn, yang memungkinkan absensi mobile dengan menggunakan verifikasi swafoto. Terkait kebijakan pengelolaan SIM, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan yang terbatas karena statusnya sebagai pengguna sistem yang tidak memiliki wewenang untuk menyesuaikan dan mengembangkan fitur aplikasi yang ada agar lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Keterbatasan ini membuat



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tidak dapat membuat atau menyesuaikan SIM untuk memenuhi kebutuhan spesifik daerahnya.

Kebijakan internal hanya dapat mengatur aspek-aspek tertentu yang terbatas dari prosedur operasional dalam suatu organisasi. Salah satunya adalah sistem kehadiran, di mana sebuah aplikasi digunakan untuk secara otomatis mencatat keterlambatan karyawan. Fitur otomatis ini bertujuan untuk merampingkan proses pelacakan kehadiran, memastikan bahwa ketepatan waktu dipantau secara konsisten dan efisien. Dalam hal audit sistem, tanggung jawab utama berada di tangan instansi yang telah mengembangkan aplikasi, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Instansi-instansi ini ditugaskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem mereka untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh untuk menjaga integritas dan efektivitas aplikasi yang digunakan.

Di tingkat dinas (pemerintah daerah), audit lebih bersifat operasional. Audit ini dilakukan setiap bulan dan mencakup berbagai aspek, termasuk catatan kehadiran, transaksi keuangan, dan penggunaan aplikasi yang dirancang untuk setiap sektor, khususnya aplikasi yang digunakan untuk operasional sektor terkait. Pendekatan operasional ini membantu memastikan bahwa fungsi sehari-hari berjalan dengan lancar dan memungkinkan setiap ketidaksesuaian untuk diidentifikasi dan ditangani secara tepat waktu.

Dalam hal keamanan data, tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada badan pusat yang berfungsi sebagai pengembang sistem. Ini berarti bahwa badan pusat harus mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi informasi sensitif dan memastikan bahwa data tetap aman dari akses yang tidak sah. Sayangnya, belum ada strategi khusus yang diartikulasikan oleh lembaga yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan keamanan data, yang dapat menimbulkan kerentanan dalam sistem. Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi selama implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) muncul dari faktor sumber daya manusia. Telah terbukti bahwa sejumlah besar karyawan tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai teknologi dan aplikasinya, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk memanfaatkan sistem secara efektif. Masalah ini diperparah dengan seringnya rotasi karyawan di dalam organisasi, karena pergantian personil yang terus menerus menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap sistem dan proses yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pekerjaan mereka. Oleh karena itu, meningkatkan literasi teknologi karyawan dan memberikan pelatihan yang memadai akan sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan keberhasilan implementasi SIM.

Akses terhadap informasi yang relevan dan struktur prosedural yang efektif masih menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam mengkaji beragam aplikasi yang tersedia serta kebutuhan dari para pemangku kepentingan, terlihat jelas bahwa belum terdapat satu pun platform digital yang mampu menyediakan informasi secara menyeluruh, mudah diakses, dan terintegrasi khusus untuk layanan UMKM. Kekosongan infrastruktur informasi ini mempersempit ruang gerak pelaku usaha kecil dalam mengembangkan bisnis, memenuhi ketentuan regulasi, dan berkompetisi secara sehat di pasar.



Karena tidak ada sistem informasi yang jelas pelaku UMKM semakin sulit untuk berkembang. Banyak pelaku UMKM yang kebingungan mencari info soal pasar, aturan terbaru dan juga informasi tentang bantuan dana dan pelatihan. Sehingga banyak pelaku UMKM yang bisnisnya cuma jalan ditempat tanpa bisa bersaing dipasar yang lebih luas. Belum lagi penggunaan teknologi dikalangan pelaku UMKM masih rendah karena minimnya akses ke sistem informasi yang ramah pengguna.

Saat ini, banyak pelaku UMKM yang menggantungkan diri pada media sosial, terutama Instagram, sebagai sumber utama informasi terkait pelatihan, program bantuan, maupun peluang usaha. Walaupun media sosial memang memiliki peran dalam membangun jejaring dan pertukaran pengalaman, sifatnya yang informal dan cepat berubah membuatnya kurang cocok dijadikan rujukan utama untuk keputusan bisnis strategis. Informasi penting mengenai regulasi, akses pembiayaan, dan panduan operasional sering kali tidak tersampaikan secara utuh, bahkan rentan terhadap distorsi dan disinformasi. Ketergantungan semata pada media sosial dapat menyebabkan pemahaman yang keliru dan pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan data yang akurat.

Disisi lain, proses perizinan masih didominasi oleh prosedur manual yang mengharuskan pelaku usaha menyerahkan dokumen fisik secara langsung ke kantor dinas terkait. Proses ini bukan hanya menyita waktu, tetapi juga menciptakan hambatan administratif yang berpotensi menghambat pertumbuhan usaha baru. Ketidakjelasan alur birokrasi serta kurangnya paduan teknis membuat banyak calon wirausahawan kehilangan motivasi atau bahkan mengurungkan niat untuk memulai usaha. Di era digital ini pelaku usaha seharusnya dapat mengakses layanan perizinan secara online bisa kapanpun dan dimanapun. Namun kenyataannya, proses digitalisasi di bidang perizinan masih lambat dan belum merata. Apalagi bagi pelaku usaha yang tinggal di daerah pelosok, mereka akan semakin kesulitan karena terkendala jarak

Balai pelatihan koperasi dan UKM sebenarnya telah menyediakan berbagai program peningkatan kapasitas seperti pelatihan manajemen, strategi pemasaran, hingga pengembangan keterampilan digital. Namun, distribusi informasi dan akses ke pelatihan tersebut masih belum merata akibat belum adanya sistem digital yang mendukung penyebaran pengetahuan secara luas. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aplikasi atau sistem digital yang mampu menjangkau dalam UMKM. Akibatnya banyak pelaku usaha yang tempatnya jauh dari pusat tidak mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan, sehingga kesenjangan pengetahuan dan keterampilan antar wilayah terus melebar. Pemanfaatan platform digital sebagai media pelatihan daring dinilai mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran serta memberikan pengalaman interaktif yang lebih menyenangkan. Dengan sistem yang tepat, peserta pelatihan dapat mengakses materi dimana saja dan kapan saja, sehingga proses pengembangan kapasitas tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu.

Jika dikembangkan secara serius, sistem digital yang terintegrasi akan mampu menyederhanakan proses perizinan, mempercepat akses informasi, serta mendukung pembelajaran berkelanjutan bagi para pelaku UMKM. Langkah ini tidak hanya akan mengatasi berbagai kendala struktural yang ada, tetapi juga membuka peluang besar untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih tangguh dan inklusif. Dengan dukungan teknologi informasi yang memadai, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, efisien, serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan adanya SIM bisa membuka peluang untuk membangun



basis data UMKM yang lebih akurat. Data yang dikumpulkan bisa dimanfaatkan untuk menganalisis tren perkembangan usaha, melihat potensi yang ada. Dengan begitu, pemerintah daerah punya dasar yang lebih kokoh dalam mengambil keputusan yang penting, sementara para pelaku UMKM bisa mengakses informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi sehari-hari.

Evaluasi kinerja UMKM masih dilakukan secara manual menggunakan angket kertas, tanpa adanya aplikasi khusus yang mendukung proses tersebut. Pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, pernah dilakukan upaya inovasi melalui pengembangan sistem informasi peserta pelatihan (SIMPATI), namun inisiatif ini terhenti ketika pegawai yang memahami substansi tersebut dimutasi ke tempat lain. Situasi ini menunjukkan lemahnya inovasi digital di lingkungan dinas tersebut. Saat ini, kebijakan terkait Sistem Informasi Manajemen (SIM) belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan layanan kepada masyarakat, terutama karena keterbatasan kewenangan dalam pengembangan aplikasi. Akibatnya, peningkatan layanan kepada koperasi dan UMKM masih sangat bergantung pada metode manual, yang berimplikasi pada peningkatan intensitas kunjungan lapangan. Pelatihan pegawai dalam penggunaan SIM juga belum berjalan secara rutin, biasanya hanya dilakukan saat terjadi pembaruan sistem atau berdasarkan permintaan dari instansi pengembang.

Pada dinas ini tidak terdapat tim khusus menangani masalah teknis, sehingga setiap kendala harus disampaikan ke pusat, SIM yang ada belum memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi dan peluang pengembangan koperasi dan UKM, sehingga analisis bisnis masih mengandalkan metode konvensional. Sementara itu, optimalisasi sistem yang ada dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan dan pembentukan tim khusus yang menangani aspek digitalisasi. Kerjasama dengan akademisi dan pelaku teknologi lokal dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengembangkan tools pendukung yang sederhana namun efektif. Perlu juga diperhatikan untuk membangun sistem *knowledge management* yang memastikan keberlanjutan pengoperasian aplikasi meskipun terjadi mutasi pegawai. Pada akhirnya transformasi digital di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat membutuhkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan aspek regulasi, SDM, infrastruktur, dan tata kelola. Dengan begitu, berbagai sistem informasi yang ada benar-benar dapat menjadi alat yang efektif untuk memajukan koperasi dan UKM, bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban administratif. Perlu adanya penggambaran tujuan yang jelas dengan tahapan pencapaian yang terukur, sehingga perkembangan sistem informasi dapat sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

Selain itu, proses perizinan untuk mendirikan dan menjalankan UMKM masih dilakukan secara manual dan cenderung berbelit-belit. Pelaku usaha sering kali harus datang langsung ke kantor dinas dengan membawa dokumen persyaratan, yang belum tentu lengkap sesuai ketentuan. Belum lagi ada berkas yang harus dikoreksi dan ditambah, prosesnya bisa berulang dan berbelit, yang mana prosedur seperti ini tidak efisien dan memakan waktu yang lama. Metode tradisional ini tidak hanya menciptakan inefisiensi, tetapi juga memperpanjang proses secara signifikan. Para pengusaha dapat terjebak dalam birokrasi, membuang waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan usaha. Hambatan seperti ini bisa sangat melelahkan dan bahkan berpotensi membuat calon pengusaha mengurungkan niat mereka untuk berwirausaha.



Dampak dari tantangan-tantangan ini tidak hanya berupa ketidaknyamanan semata, tetapi juga dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi, terutama di komunitas yang sangat bergantung pada keberlangsungan UMKM. Tidak bisa di pungkira bahwa UMKM telah menjadi penopang bagi ekonomi di Indonesia. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, ketahanan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi. Ketika pelaku UMKM kesulitan untuk berkembang karena SIM yang belum mendukung, artinya kita telah menyia-nyiakan potensi yang besar yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Oleh karena itu, hambatan yang dihadapi pelaku UMKM perlu segera diatasi agar potensi mereka dapat dimaksimalkan.

Namun di sisi lain, pusat pelatihan koperasi dan UKM telah menyediakan berbagai program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan di berbagai bidang penting seperti pengembangan sumber daya manusia, manajemen usaha, dan strategi pemasaran. Meskipun program-program ini memiliki nilai yang tinggi, penggunaannya masih belum optimal karena metode penyampaian yang terbatas dan aksesibilitas yang rendah. Integrasi sistem digital formal dapat merevolusi cara pelatihan ini diakses dan dimanfaatkan. Sistem semacam itu tidak hanya memungkinkan pengembangan kursus daring yang komprehensif, tetapi juga mempermudah komunikasi antara instruktur dan peserta pelatihan. Selain itu, sistem ini dapat menyediakan berbagai sumber belajar daring seperti tutorial, webinar, dan peluang jejaring yang dapat memperkuat kapasitas pemilik UMKM dalam mengelola bisnisnya dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, dengan memanfaatkan berbagai teknologi seperti aplikasi mobile atau portal daring, para pelaku usaha dapat mengikuti pelatihan secara mandiri, mengakses program mentoring, serta berpartisipasi dalam lokal karya interaktif dari rumah atau tempat kerja mereka. Fleksibilitas ini sangat penting bagi pemilik UMKM yang sering kali memiliki tanggung jawab ganda dan kesulitan untuk menghadiri pelatihan secara langsung.

Pengembangan platform digital khusus tidak hanya akan menyederhanakan berbagai proses dan operasi tetapi juga memberdayakan para pelaku usaha dengan alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berhasil. Dengan mewujudkan visi ini, para pemangku kepentingan dapat menciptakan ekosistem yang lebih mendukung, mendorong inovasi, mempercepat pertumbuhan, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap perekonomian yang lebih dinamis. Investasi dalam inisiatif transformasional semacam ini tidak hanya menguntungkan masing-masing pelaku usaha, tetapi juga dapat menciptakan efek berantai yang memperkuat ketahanan dan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Dalam lingkungan bisnis yang serba cepat saat ini, perusahaan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan mereka. Proses yang rumit, sistem informasi yang terfragmentasi, dan kurangnya sumber daya yang dapat diakses dapat menyebabkan frustrasi dan kehilangan peluang. Platform digital yang mengonsolidasikan elemen-elemen ini dapat menghilangkan hambatan tersebut, sehingga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetensi inti dan tujuan strategis mereka.

Salah satu keuntungan utama dari platform semacam itu adalah kemampuannya untuk menyediakan data dan analisis secara real-time. Dengan memanfaatkan kekuatan data, bisnis dapat membuat keputusan yang tepat yang mendorong efisiensi dan inovasi. Akses ke wawasan yang



relevan memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi tren, memprediksi perilaku pelanggan, dan menyesuaikan penawaran mereka. Dengan cara ini, platform ini dapat meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan, yang sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Selain itu, dengan mewujudkan visi ini, para pemangku kepentingan akan dapat menciptakan ekosistem yang lebih mendukung yang mendorong kolaborasi dari berbagi sumber daya di antara para pelaku bisnis. Lingkungan kolaboratif ini tidak hanya menumbuhkan peluang jaringan tetapi juga mengarah pada berbagi praktik terbaik dan ide-ide inovatif. Usaha kecil dan menengah, khususnya, dapat memperoleh manfaat yang signifikan dari pengetahuan kolektif ini saat mereka menavigasi kompleksitas pasar.

Selain keuntungan finansial, platform digital juga dapat berfungsi sebagai sumber daya pendidikan yang penting. Dengan mengintegrasikan modul pelatihan dan program pengembangan, platform ini memberikan akses kepada pebisnis berupa pengetahuan dan keterampilan berharga yang dapat meningkatkan tenaga kerja mereka. Pembelajaran dan peningkatan keterampilan yang berkelanjutan sangat penting dalam pasar yang berubah dengan cepat, dan sumber daya semacam itu mendorong kemampuan beradaptasi dan ketahanan di antara bisnis.

Ketika bisnis berkembang dalam ekosistem yang mendukung ini, mereka berkontribusi pada lanskap ekonomi secara keseluruhan. Dengan mendorong inovasi, mempercepat pertumbuhan, dan mendorong persaingan, mereka membantu menciptakan ekonomi yang lebih dinamis. Vitalitas di dalam pasar ini tidak hanya menguntungkan bisnis, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan menstimulasi komunitas lokal. Investasi dalam inisiatif transformasional seperti itu tidak hanya menguntungkan bisnis individu, tetapi juga dapat menciptakan efek riak yang memperkuat ketahanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ekonomi lokal yang kuat yang didukung oleh bisnis yang berkembang akan meningkatkan belanja konsumen, yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor. Lingkaran umpan balik positif ini sangat penting untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, dampak terhadap masyarakat lebih dari sekadar aspek finansial. Ketika bisnis berkembang, mereka memiliki kemampuan untuk terlibat dalam inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan, berkontribusi pada tujuan dan proyek lokal. Hal ini membangun rasa kebersamaan dan menumbuhkan niat baik di antara penduduk, meningkatkan kualitas hidup semua orang yang terlibat. Platform digital khusus dapat berfungsi sebagai model untuk transformasi digital di seluruh industri. Platform ini dapat menampilkan studi kasus dan praktik terbaik yang berhasil, sehingga mendorong bisnis lain untuk mengadopsi inisiatif serupa. Adopsi teknologi yang meluas ini dapat menghasilkan lanskap bisnis yang lebih inovatif dan kompetitif.

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga akan memainkan peran penting dalam keberhasilan inisiatif ini. Para pembuat kebijakan dan pemimpin industri harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan dan mendukung evolusi platform. Kemitraan ini dapat memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dan ekonomi diprioritaskan dan ditangani secara efektif.

Pengembangan platform digital khusus menawarkan potensi yang sangat besar untuk penyederhanaan, pemberdayaan, dan inovasi. Dengan menyatukan bisnis dan meningkatkan kemampuan mereka, hal ini akan menjadi dasar bagi ekonomi yang tangguh dan sejahtera. Para pemangku kepentingan harus tetap berkomitmen pada visi ini, menyadari bahwa manfaatnya tidak



hanya untuk kesuksesan individu, tetapi juga untuk kesejahteraan kolektif masyarakat dan masa depannya. Pendekatan holistik ini tidak hanya dapat mentransformasi bisnis, tetapi juga lanskap ekonomi secara keseluruhan, sehingga mendorong masa depan yang lebih cerah bagi semua.

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam mewujudkan potensi penuh dari inisiatif ini. Para pembuat kebijakan dan pemimpin industri harus bersatu untuk mengembangkan lanskap yang memprioritaskan pertumbuhan dan inovasi, memastikan bahwa platform yang dikembangkan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan ekonomi. Kemitraan ini akan sangat penting dalam menavigasi kompleksitas pasar yang terus berkembang. Singkatnya, merangkul platform digital khusus menandakan langkah penting untuk meningkatkan kesuksesan bisnis melalui inovasi, kolaborasi, dan edukasi. Dengan menghubungkan nasib perusahaan-perusahaan individu dengan komunitas yang lebih luas, para pemangku kepentingan dapat membangun masa depan yang ditandai dengan ketahanan, keberlanjutan, dan kemajuan yang dinamis. Komitmen terhadap visi yang berpikiran maju ini menjanjikan transformasi lanskap ekonomi, membina lingkungan di mana bisnis dan masyarakat dapat berkembang secara harmonis.

Tabel 1. Keterangan Tabel Informasi SIM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Barat

No	Aspek	Deskripsi
1	Aplikasi Digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • SIPD (Kemendagri): Administrasi keuangan daerah • SIPAGA: Pengadaan barang, harga satuan, manajemen aset • INAPROC: Proses tender elektronik • SRIKANDI: Surat menyurat • SIMPEG (BKD): Status karyawan dan kenaikan pangkat • E-Kinerja: Monitoring • AbOn: Absensi mobile (verifikasi swafoto)
2	Kebijakan & Audit	<ul style="list-style-type: none"> • Audit bulanan operasional dilakukan oleh dinas • Audit sistem dilakukan oleh pusat (Kominfo, Kemendagri, BKD) • Sistem absensi otomatis mendeteksi keterlambatan
3	Pelatihan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pelatihan manajemen, pemasaran, digital, dsb. • Akses informasi dan distribusi pelatihan belum merata • Belum ada sistem daring untuk pelatihan

KESIMPULAN

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat telah mengadopsi berbagai aplikasi digital untuk mendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM), seperti SIPD, SIPAGA, INAPROC, SRIKANDI, SIMPEG, dan E-Kinerja. Namun, kendala utama terletak pada tidak adanya tim khusus yang menangani masalah teknis, sehingga setiap kendala harus dirujuk ke instansi pusat. Selain itu, sistem yang ada belum mampu mengidentifikasi peluang pengembangan bisnis UMKM, sehingga analisis masih mengandalkan metode konvensional. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM dan pembentukan tim digital khusus untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi.

Transformasi digital di dinas ini masih terhambat oleh keterbatasan kewenangan dalam pengembangan sistem, karena statusnya sebagai pengguna aplikasi yang dikembangkan oleh kementerian Kominfo, Kemendagri, dan BKD. Akibatnya, dinas tidak dapat menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan lokal. Kebijakan internal hanya mampu mengatur aspek operasional terbatas, seperti sistem absensi, sementara audit sistem sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi pusat.



Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan kolaborasi dengan akademisi dan penyedia teknologi lokal guna menciptakan solusi jangka pendek yang lebih adaptif.

Tantangan utama dalam implementasi SIM berasal dari rendahnya literasi digital pegawai dan seringnya rotasi karyawan, yang mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam pengelolaan sistem. Di sisi lain, pelaku UMKM masih menghadapi kesulitan mengakses informasi terpadu karena ketiadaan platform digital khusus. Mereka bergantung pada media sosial seperti Instagram, yang rentan terhadap disinformasi, serta proses perizinan manual yang berbelit-belit. Kondisi ini memperlambat pertumbuhan UMKM dan menurunkan motivasi wirausaha.

Meskipun Balai Pelatihan Koperasi dan UKM menyediakan program peningkatan kapasitas, distribusi informasinya tidak merata akibat kurangnya dukungan sistem digital. Pengembangan platform pelatihan daring dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan dan fleksibilitas pembelajaran. Selain itu, evaluasi kinerja UMKM yang masih manual dan terhentinya inovasi seperti SIMPATI menunjukkan lemahnya pengetahuan (knowledge management) sangat penting untuk memastikan kelangsungan operasional meski terjadinya mutasi pegawai.

Untuk mencapai transformasi digital yang efektif, diperlukan pendekatan holistik mencakup regulasi, SDM, infrastruktur, dan tata kelola. Langkah strategis seperti pembentukan tim digital, pelatihan berkala, kolaborasi dengan pihak eksternal, dan pengembangan platform terintegrasi akan memungkinkan SIM menjadi alat pengembangan UMKM, bukan sekedar pemenuhan administratif. Dengan demikian, Dinas Koperasi dan UMKM dapat menciptakan ekosistem usaha yang efisien, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boddy, d., Boonstra, A., & Kennedy, G. (2009). *Managing Information System: Strategy and Organisation*. Pearson Education.
- Depan, S., & Seltubir A. (2021). *Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mamberamo Raya*. Katalog. Ukdw. Ac.Id.
- Iskanda, F., & Sitorus, Z. (2024). *Design and Build System Applications Design and Build Information System Applications IT Infrastructure Training and Training*. 5(2), 37–43. <https://doi.org/10.47065/bit.v5i2.1224>
- Najib, M. A., & Maunah, B. (2022). Inovasi Pendidikan Di Era Digital (Studi Pelaksanaan Pembelajaran Di Jenjang Sd-Smp Kabupaten Tulungagung). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 1–17.
- Nurlaila Nurlaila, Zuriatin Zuriatin, & Nurhasanah Nurhasanah. (2024). Transformasi Digital Pelayanan Publik: Tantangan dan Prospek dalam Implementasi E-Government di Kabupaten Bima. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 21–37. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1468>
- Octiva, C. S., Haes, P. E., Fajri, T. I., Eldo, H., & Hakim, M. L. (2024). Implementasi Teknologi Informasi pada UMKM: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1), 815–821. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i1.13823>
- Paidi. (2008). Urgensi pengembangan kemampuan pemecahan masalah dan metakognitif siswa SMA melalui pembelajaran biologi. *Prosiding, Seminar dan Musyawarah Nasional MIPA yang diselenggarakan oleh FMIPA UNY, tanggal 30 Mei 2008*. Yogyakarta: Universitas



Negeri Yogyakarta.

Purnama, C. (2016). *Sistem Informasi Manajemen*. Mojokerto: Insan Global.

Ramadhan, M. R., Firdaus, K. A., & ... (2024). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen dan Bisnis Intelijen Terhadap Informasi Keuangan. ... *Manajemen dan ...*, 3(1), 106–118. <http://www.jurnalprisanicendekia.com/index.php/portofolio/article/view/286%0Ahttps://www.jurnalprisanicendekia.com/index.php/portofolio/article/download/286/309>

Rodriguez, C. (2022). Social Dynamics Review Digitalization in Government: Enhancing Public Service Delivery through Technology. *Social Dynamics Review*, 5, 1–13. <https://academicpinnacle.com/index.php/SDR/article/view/12>

Sabeeha, O., Jassim, N., Nameer, Q., Raad, K., & Ruslan, K. (2024). The role of digitalization in improving accountability and efficiency in public services. *Investigacion Operacional*, 45(2), 203–223. https://rev-inv-ope.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/inline-files/45224-11_0.pdf